

Indikator Kesejahteraan Rakyat **KABUPATEN BUTON SELATAN**

Tahun 2022



Indikator Kesejahteraan Rakyat **KABUPATEN BUTON SELATAN**

Tahun 2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022

ISSN: 2655-402X

Nomor Publikasi: 74150.2015

Katalog: 4102004.7415

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 84 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM

Penanggungjawab Umum / General in Charge:

Zablin, SST., M.Si.

Penyunting / Editor:

Maryam Rasyid, S.Tr.Stat

Penulis / Writer:

Dyah Nur Isnaini, S.Tr.Stat.

Pengolah Data / Data Processor:

Dyah Nur Isnaini, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit / Cover Design:

Dyah Nur Isnaini, S.Tr.Stat.

Infografis/Infographic:

Siti Karimah, SST.

<https://bsepub.uns-go.id>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Selatan 2022 merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Buton Selatan antar waktu, berdasarkan kecamatan maupun jenis kelamin penduduknya. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Sensus Penduduk 2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pasarwajo, September 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Buton



Zablin, SST., M.Si



DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Singkatan dan Akronim	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Kependudukan	7
Bab 3 Kesehatan	19
Bab 4 Pendidikan	29
Bab 5 Ketenagakerjaan	43
Bab 6 Taraf dan Pola Konsumsi	57
Bab 7 Perumahan	67
Bab 8 Kemiskinan	73
Sumber Data	81

DAFTAR TABEL

KEPENDUDUKAN

2.1.	Jumlah Penduduk dan Rasio Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021.....	12
2.2.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2021.....	13
2.3.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan, 2018-2021.....	16
2.4.	Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021	16
2.5.	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2021	17

KESEHATAN

3.1.	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan, 2021	27
3.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, 2021	28

PENDIDIKAN

4.1.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021.....	36
4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal menurut Jenis Kelamin, 2020-2021.....	39
4.3.	Jumlah Fasilitas Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Kecamatan, 2021.....	40

KETENAGAKERJAAN

5.1.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2021	47
------	--	----

5.2.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2021.....	51
5.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2021	53

TARAF DAN POLA KONSUMSI

6.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Makanan Sebulan Menurut Kelompok Komoditi, 2020-2021.....	61
6.2.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Bukan Makanan Sebulan Menurut Kelompok Komoditi, 2020-2021.....	63
6.3.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2021	63

PERUMAHAN

7.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2019-2021.....	71
7.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2019-2021.....	72

KEMISKINAN

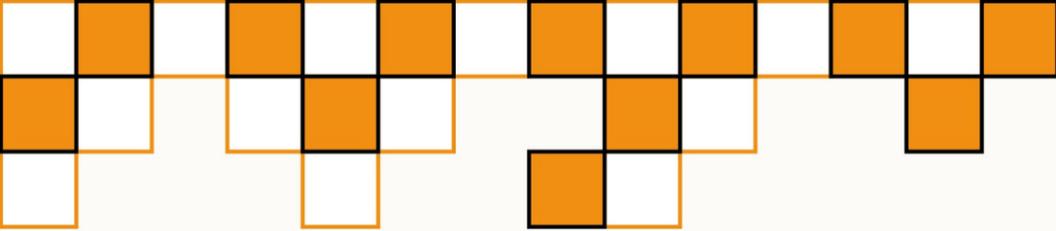
8.1.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Buton Selatan, 2019-2021.....	76
8.2.	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, Maret 2019-2021	78

DAFTAR GAMBAR

2.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan, 2010-2021.....	11
2.2.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021	15
3.1	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2021	22
3.2.	Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2021	23
3.3.	Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Buton Selatan Kelompok Pengeluaran, 2021	24
3.4.	Persentase Balita di Kabupaten Buton Selatan yang Mendapatkan Imunisasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang Diberikan, 2021	25
4.1.	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021	34
4.2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021	37
4.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buton Selatan, 2019-2021	38
5.1.	Perkembangan TPAK Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021.....	49
5.2.	Perkembangan TPT Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021.....	50
5.3.	Persentase Penduduk Kabupaten Buton Selatan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021	54
6.1.	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Buton Selatan dan Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pengeluaran, 2020-2021	60
6.2.	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari, 2019-2021.....	64
8.1.	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021	77

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
Baduta	Bawah Dua Tahun
Balita	Bawah Lima Tahun
BCG	Bacillus Calmette Guerin
BPS	Badan Pusat Statistik
DPT	Difteri, Pertusis, Tetanus
DR	<i>Dependency Ratio</i>
HLS	Harapan Lama Sekolah
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PKH	Program Keluarga Harapan
PUS	Pasangan Usia Subur
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
STTB	Surat Tanda Tamat Belajar
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
WUS	Wanita Usia Subur



BAB I

PENDAHULUAN



Kependudukan



Kesehatan



Pendidikan



Ketenagakerjaan



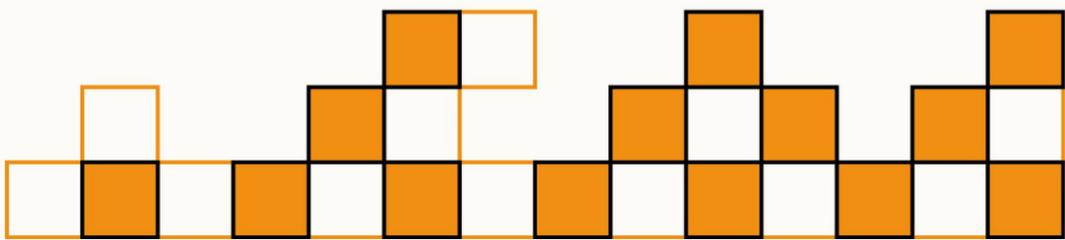
Taraf dan Pola Konsumsi



Perumahan



Kemiskinan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap manajemen pemerintahan dan strategi pemerintahan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (**public participant**), pemerataan dan keadilan (**equity and equality**) serta harus mengelola potensi dan keanekaragaman daerah secara efektif, efisien dan berwawasan lingkungan.

Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, wujud otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan tertentu yang diatur peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan daerah juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, dengan harapan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut benar-benar harus dapat mencerminkan demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan kondisi dan potensi serta keanekaragaman daerah.

Dengan demikian makna utama yang terkandung dalam otonomi daerah adalah : (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menyikapi tuntutan perubahan tersebut pemerintah daerah dituntut harus mampu menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih komprehensif, akomodatif, objektif, terarah, dan berkelanjutan. Untuk membangun suatu perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang komprehensif, objektif, dan terarah tersebut diperlukan data yang terimplentasi melalui suatu indikator-indikator makro sosial ekonomi.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk dapat menghimpun, mentabulasi, merumuskan, menganalisa, dan menyajikan data-data tentang kondisi pembangunan berbagai sektor dan sub sektor saat ini dan perkembangannya beberapa tahun sampai dengan tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya publikasi ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan pengendalian pembangunan yang sedang dilaksanakan serta sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah berdasarkan data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu

diantaranya Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diperkaya dengan data sekunder terutama yang berasal dari instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bagian, yaitu :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari :

1. Latar Belakang
2. Maksud Dan Tujuan
3. Sumber Data
4. Sistematika Penyajian

Bagian kedua, menyajikan aspek kependudukan yang mencakup :

1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk
3. Angka Beban Ketergantungan
4. Status Perkawinan dan Kepemilikan NIK

Bagian ketiga dibahas aspek kesehatan penduduk yang ditinjau melalui :

1. Derajat Kesehatan Penduduk
2. Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Pada bagian keempat dipaparkan kondisi pendidikan di Kabupaten Buton Selatan, yang mencakup :

1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
2. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan
3. Tingkat Partisipasi Sekolah

4. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pada bagian kelima dipaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Buton Selatan, yang mencakup :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Tingkat Pendidikan Penduduk Bekerja
3. Lapangan Pekerjaan Utama
4. Status Pekerjaan Utama

Bagian keenam, menyajikan aspek taraf dan pola konsumsi penduduk yang mencakup :

1. Pengeluaran Rumah Tangga
2. Konsumsi Energi dan Protein

Pada bagian ketujuh dipaparkan mengenai perumahan di Kabupaten Buton Selatan, yang mencakup :

1. Fasilitas Rumah Tinggal
2. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Pada bagian kedelapan dipaparkan mengenai kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan, yang mencakup :

1. Perkembangan Penduduk Miskin
2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

BAB II

KEPENDUDUKAN

KONSEP PENDUDUK MENURUT BPS

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia **selama 1 tahun atau lebih dan atau akan berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap.**

JUMLAH PENDUDUK BUTON SELATAN MENURUT JENIS KELAMIN

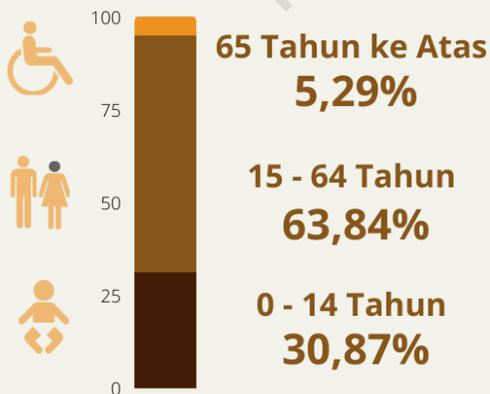


48.241

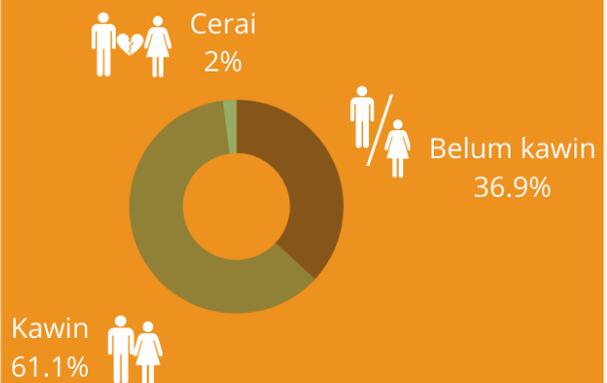


47.231

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR



PERSENTASE PENDUDUK USIA 15-49 TAHUN MENURUT STATUS PERKAWINAN



Rasio Ketergantungan

$$\frac{\text{Icon of wheelchair} + \text{Icon of baby}}{\text{Icon of couple}} = 56,63$$

BAB II KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk merupakan kekayaan bangsa sekaligus modal dasar pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian, dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana, maka akan menjadi beban pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Aspek kependudukan yang perlu mendapat perhatian mencakup jumlah dan distribusi penduduk. Disamping itu, program perencanaan pembangunan sosial harus mendapat prioritas utama karena bermuara kepada peningkatan kesejahteraan penduduk. Distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Tingkat pemerataan hasil pembangunan akan mempengaruhi penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah dimana terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempatinya sebelumnya.

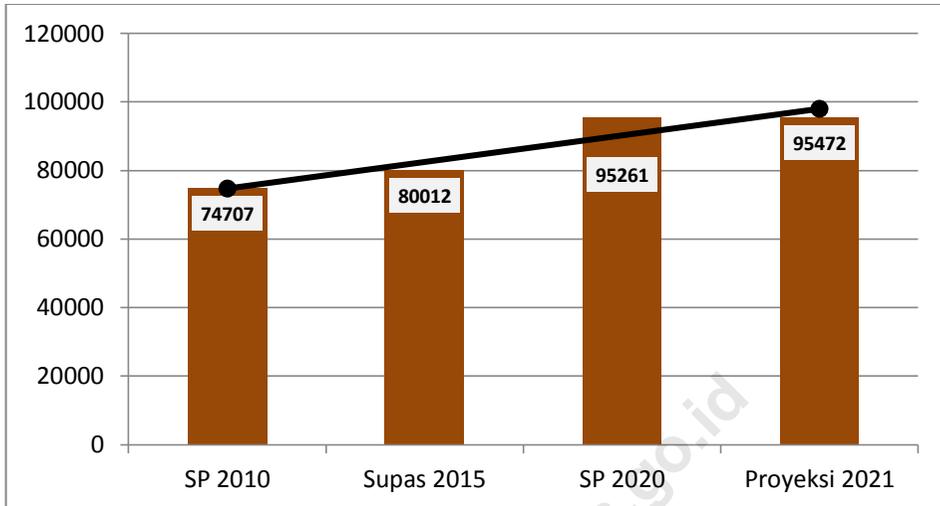
Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain

itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, struktur umur penduduk, piramida penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan, dan penyebaran penduduk. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

2.1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia. Namun, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan sendiri masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Buton Selatan tercatat 95.261 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 48.182 penduduk laki-laki dan 47.079 penduduk perempuan. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen atau mengalami penambahan penduduk sebesar 211 jiwa.



Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan, 2010-2021

Pada gambar 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hasil survei dan sensus terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 74.707 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,10 persen pada tahun 2015 berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas). Lima tahun berikutnya, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Buton Selatan meningkat 19,06 persen atau berjumlah 95.261 jiwa. Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur pada tabel 2.1, penduduk laki-laki di Kabupaten Buton Selatan lebih banyak jumlahnya dibandingkan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,14. Angka rasio jenis kelamin ini menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan. Dengan kata lain, di Kabupaten Buton Selatan terdapat 102 laki-laki diantara 100 orang perempuan. Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan terbanyak pada kelompok umur 0-4 tahun dan 15-19 tahun.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

Kelompok umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0-4	5 057	5 066	10 123	99,82
5-9	4 772	4 797	9 569	99,48
10-14	5 018	4 758	9 776	105,46
15-19	5 336	4 872	10 208	109,52
20-24	4 884	4 835	9 719	101,01
25-29	4 511	3 981	8 492	113,31
30-34	4 053	3 492	7 545	116,07
35-39	3 036	2 972	6 008	102,15
40-44	2 592	2 499	5 091	103,72
45-49	2 176	2 164	4 340	100,55
50-54	1 955	1 885	3 840	103,71
55-59	1 513	1 581	3 094	95,70
60-64	1 184	1 432	2 616	82,68
65-69	854	1 057	1 911	80,79
70-74	654	896	1 550	72,99
75+	646	944	1 590	68,43
Total	48 241	47 231	95 472	102,14

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Selatan 2021

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kabupaten Buton Selatan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sedangkan di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Perbedaan jumlah penduduk ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat dan fasilitas umum yang tersedia.

Persebaran penduduk Kabupaten Buton Selatan terkonsentrasi pada wilayah daratan Pulau Buton. Dilihat dari distribusi penduduk Kabupaten Buton Selatan menurut kecamatan, tampak bahwa 24,75 persen penduduk berada di Kecamatan Sampolawa. Sedangkan Kecamatan Lapandewa dihuni oleh 10,34 persen penduduk Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk (Persen)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Batu Atas	12,91	1 341
2	Lapandewa	10,34	110
3	Sampolawa	24,75	106
4	Batauga	18,69	120
5	Siompu Barat	10,90	714
6	Siompu	11,73	290
7	Kadatua	10,68	424
Buton Selatan		100,00	175

Sumber : Publikasi Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

Pada tahun 2021 kepadatan penduduk di Kabupaten Buton Selatan sebesar 175 jiwa/km². Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Buton Selatan dikarenakan wilayahnya yang relatif luas, dimana banyak diantaranya merupakan daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, perbukitan, dan lainnya.

Dari Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa Kecamatan Batu Atas merupakan kecamatan terpadat, dimana pada tahun 2021 kepadatan penduduknya sebesar 1.341 jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Sampolawa merupakan kecamatan paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sekitar 106 jiwa/km². Kondisi ini disebabkan karena tidak imbangnya jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah dengan luas wilayahnya. Seperti di Kecamatan

Batu Atas yang merupakan daratan dengan luas yang relatif kecil ditempati oleh banyak penduduk sehingga kepadatannya menjadi besar, berbanding terbalik dengan Kecamatan Sampolawa yang memiliki luas daratan yang besar namun penduduknya sedikit sehingga perbandingan kepadatannya pun menjadi kecil.

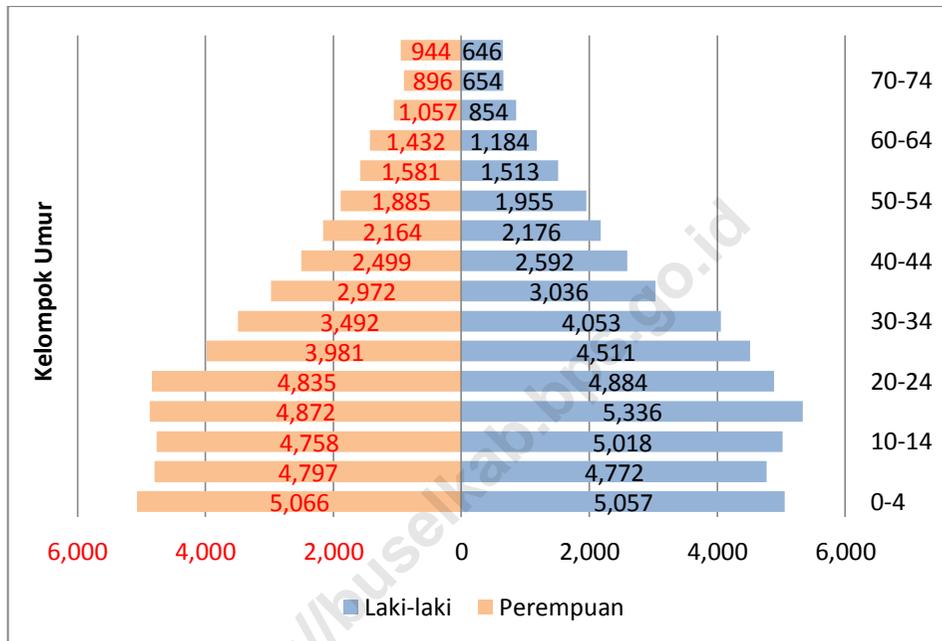
2.3. Angka Beban Ketergantungan

Dalam ilmu kependudukan ada tiga pengelompokan penduduk berkenaan dengan kaitan antara struktur umur dan kemampuan berproduksi secara ekonomi, yaitu:

- Kelompok penduduk usia muda, yaitu penduduk yang berumur dibawah 15 tahun (0-14 tahun).
- Kelompok penduduk usia produktif, yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun.
- Kelompok penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 65 tahun ke atas.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio/DR*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah jumlah penduduk 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Dengan kata lain angka beban ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk yang tidak produktif (usia muda dan usia tua) terhadap penduduk usia produktif. Oleh karena itu angka beban ketergantungan terdiri dari angka beban ketergantungan muda (*Young Age Dependency Ratio/YADR*) dan angka beban ketergantungan tua (*Old Age Dependency Ratio/OADR*). Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban

ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Gambar 2.2. Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021

Gambar 2.2. diatas menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Buton Selatan didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun. Selainitu, penduduk usia muda di Kabupaten Buton Selatan lebih besar jumlahnya daripada penduduk usia tua. Hal ini dapat diamati pada 3 (tiga) kelompok umur yaitu kelompok umur 0-4 tahun, umur 5-9 tahun, dan kelompok umur 10-14 tahun.

Tabel 2.3 menunjukkan angka beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021. Penduduk usia muda memiliki angka rasio ketergantungan yang cukup tinggi yakni 48,35 persen. Sementara itu, jumlah kelompok penduduk usia tua yang kecil menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu 8,29 persen. Secara total, angka beban

ketergantungan Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sebesar 56,63 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 57 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan, 2018-2021

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Beban Ketergantungan		
				YADR	OADR	DR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2018	34,26	59,03	6,71	58,03	11,37	69,39
2019	33,84	59,24	6,92	57,12	11,68	68,81
2020	31,19	63,72	5,09	48,95	7,99	56,94
2021	30,87	63,84	5,29	48,35	8,29	56,63

Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk (diolah)

2.4. Status Perkawinan dan Kepemilikan NIK

Pada tahun 2021, sebanyak 61,11 persen penduduk Kabupaten Buton Selatan yang berusia 15-49 tahun berstatus kawin. Penduduk laki-laki bersatatus kawin sebanyak 53,83 persen sedangkan penduduk perempuan sebanyak 67,92 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang belum kawin sebesar 36,86 persen yang terdiri dari 44,66 persen laki-laki dan 29,57 persen perempuan. Persentase penduduk cerai sebesar 2,03 persen.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021

Jenis Kelamin	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
[1]	[2]	[3]	[4]
Laki-Laki	44,66	53,83	1,51
Perempuan	29,57	67,92	2,52
Buton Selatan	36,86	61,11	2,03

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir hingga setelah meninggal dunia. NIK penduduk yang meninggal dunia tidak dapat dialihkan atau dipakai lagi oleh orang lain, sehingga NIK menjadi nomor identitas tunggal yang berperan sebagai kunci akses setiap penduduk untuk mendapatkan berbagai layanan publik.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2021

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
[1]	[2]	[3]
Laki-Laki	99,32	99,20
Perempuan	99,11	98,82
Buton Selatan	99,21	99,00

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

“Halaman ini Sengaja Dikosongkan”

<https://usek kab.bps.go.id>

BAB III

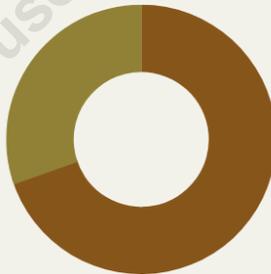
KESEHATAN

Angka Kesakitan

penduduk perempuan sebesar **15,07%**
lebih tinggi dari penduduk laki-laki yang sebesar **13,80%**

PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN

Tidak Menggunakan JK
30.4%



Menggunakan JK
69.6%

BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN



Rumah Sakit

1



Puskesmas

9



Apotek

5



Puskesmas Pembantu

17

BAB III

KESEHATAN

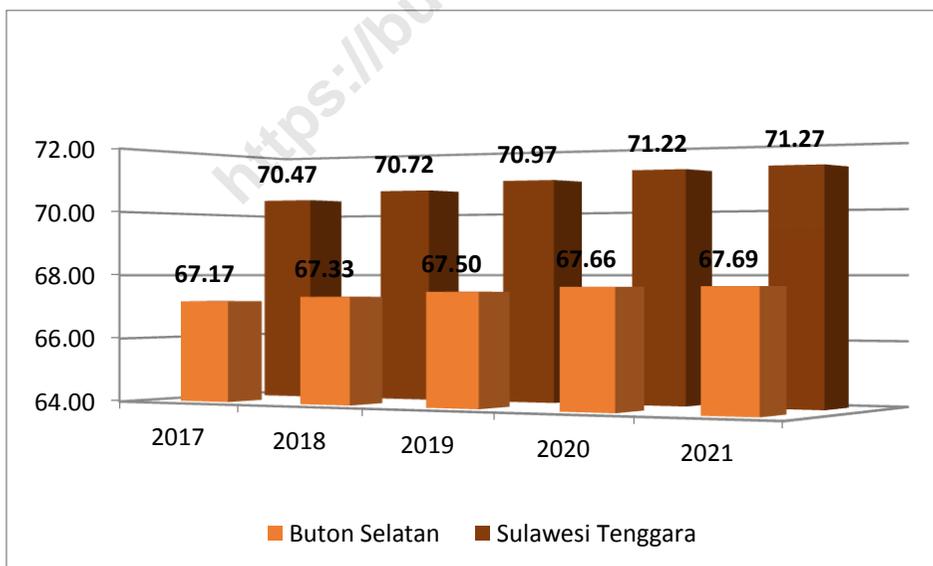
Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi pada suatu negara/wilayah. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu; serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, Imunitas Balita, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

3.1. Derajat Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan hidup di Kabupaten Buton Selatan dari tahun ke tahun hanya memperlihatkan sedikit peningkatan. Angka harapan hidup di Kabupaten Buton Selatan selama 2017 hingga 2021 cenderung stagnan yaitu berada pada angka 67 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang bayi yang baru lahir diperkirakan akan bertahan hingga berumur 67 tahun. Pada tahun 2017, angka harapan hidup penduduk Buton Selatan 67,17 tahun, kemudian angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 67,33 tahun. Pada tahun 2019, angka harapan hidup penduduk Buton Selatan 67,5 tahun. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,16 menjadi 67,66 dan di tahun 2021 meningkat menjadi 67,69 tahun. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang kecil, namun peningkatan ini menunjukkan arti bahwa terjadi perbaikan tingkat kesehatan makro penduduk Buton Selatan.

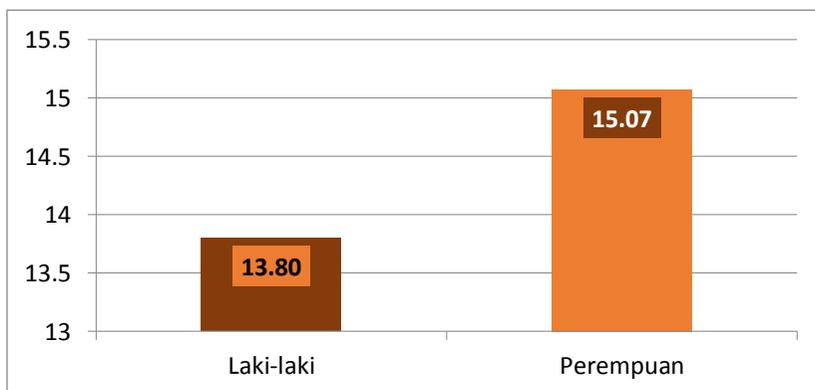


Gambar 3.1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017-2021

Apabila angka harapan hidup penduduk Buton Selatan dibandingkan dengan Angka provinsi Sulawesi Tenggara, usia harapan hidup rata-rata

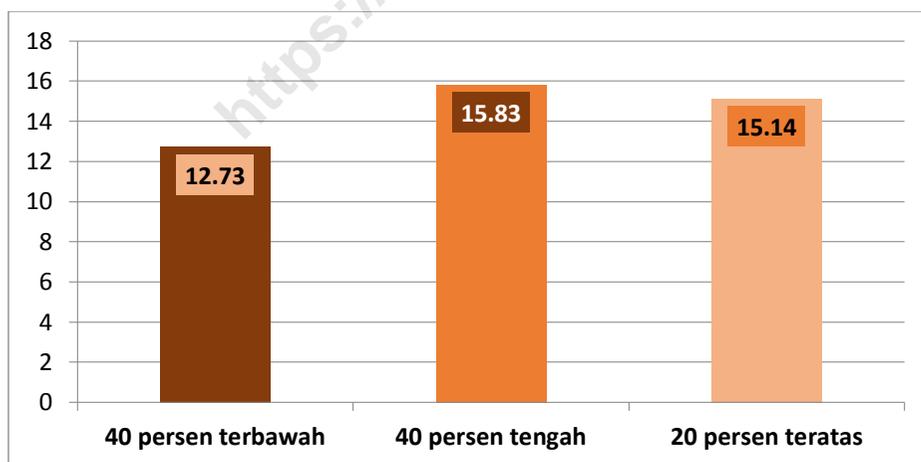
penduduk Kabupaten Buton Selatan masih tergolong lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut tergambar dari angka harapan hidup di Sulawesi Tenggara yang mencapai 71,27 tahun pada tahun 2021 sedangkan Kabupaten Buton Selatan hanya 67,69 tahun. Selama 2017 hingga 2021, angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan satu tahun. Kondisi ini hendaknya dapat dijadikan pertimbangan untuk menambah fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa pada tahun-tahun mendatang, khususnya di Buton Selatan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Gambar 3.2. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Buton Selatan Menurut Jenis Kelamin 2021

Angka kesakitan penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2021 sebesar 14,45 persen, angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2020 yang mencapai 16,95 persen. Berdasarkan gambar 3.2, angka kesakitan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan angka kesakitan penduduk perempuan, dimana angka kesakitan untuk perempuan pada tahun 2021 adalah sebesar 15,07 sedangkan untuk laki-laki sebesar 13,80. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Buton Selatan perempuan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan laki-laki. Kondisi ini bisa saja terjadi dikarenakan pola hidup dan aktifitas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Umumnya laki-laki memiliki pola hidup yang lebih sehat dibandingkan perempuan karena berolahraga dan mengeluarkan lebih banyak keringat daripada perempuan. Meskipun, laki-laki biasanya melakukan kegiatan yang lebih berat dan lebih sering berada di lingkungan yang kurang sehat dibandingkan dengan perempuan namun hal ini tidak terlalu signifikan menjadi penyebab tingginya angka kesakitan laki-laki.



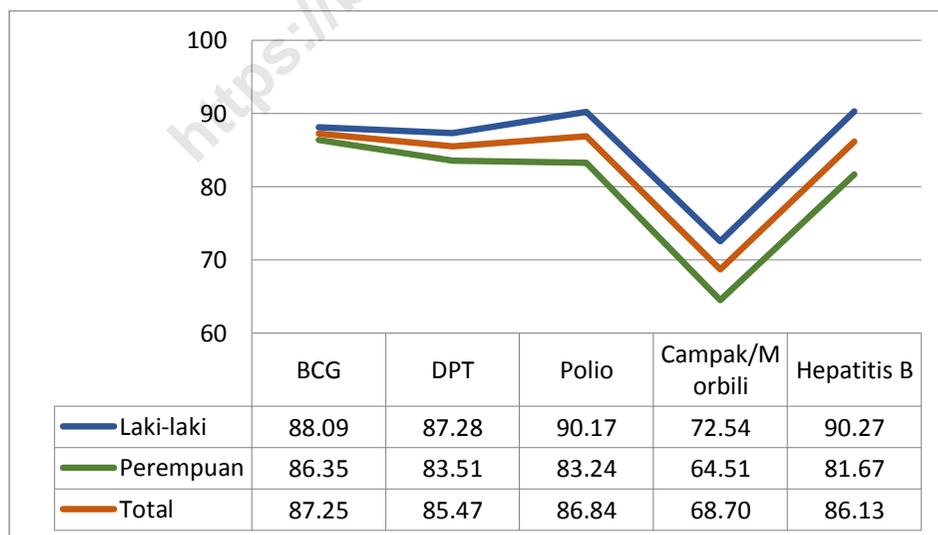
Gambar 3.3. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Buton Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran 2021

Ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran pada gambar 3.3, angka kesakitan penduduk kelompok pengeluaran 40% tengah lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran 20% terbawah dan 40% terbawah. Angka

kesakitan penduduk kelompok pengeluaran 20% teratas adalah sebesar 15,14; sedangkan kelompok pengeluaran 40% tengah sebesar 15,83 dan 40% terbawah sebesar 12,73. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Buton Selatan, penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% tengah lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Kondisi ini bisa terjadi karena pola hidup dan konsumsi yang berbeda.

3.2. Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan bayi dan balita adalah peningkatan cakupan imunisasi. Pada tahun 2021, terdapat 87,25 persen balita mendapatkan imunisasi BCG; 85,47 persen mendapatkan imunisasi DPT; 86,84 persen mendapatkan imunisasi Polio; 68,70 persen mendapatkan imunisasi Campak, dan 86,13 persen sudah mendapatkan imunisasi Hepatitis B.



Gambar 3.4. Persentase Balita di Kabupaten Buton Selatan yang Mendapatkan Imunisasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi yang Diberikan, 2021

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase balita perempuan yang mendapatkan imunisasi masih lebih rendah daripada persentase cakupan imunisasi untuk balita laki-laki. Persentase balita perempuan yang menerima imunisasi Campak lebih rendah dari imunisasi lainnya yaitu sebesar 64,51%. Sama seperti perempuan, persentase balita laki-laki yang menerima imunisasi Campak juga lebih rendah dari imunisasi lainnya yaitu sebesar 72,54% .

Dari gambar 3.4 terlihat bahwa masih ada beberapa anak balita yang belum menerima imunisasi dasar lengkap. Hal ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena pemberian imunisasi sangat menentukan masa depan anak dalam hal kualitas hidup sehat. Untuk itu, imunisasi masih perlu menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator inti untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Untuk menurunkan AKI salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan dalam hal sumber daya kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan

sumber daya kesehatan dan menekankan pada Standar Pelayanan Dasar bidang kesehatan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.1. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Batuatas	-	1	1	-
2	Lapandewa	-	1	-	-
3	Sampolawa	-	3	8	1
4	Batauga	1	1	3	3
5	Siompu Barat	-	1	-	1
6	Siompu	-	1	2	-
7	Kadatua	-	1	3	-
Buton Selatan		1	9	17	5

Sumber : Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat dilihat bahwa ketersediaan fasilitas rumah sakit di Buton Selatan sebanyak 1 rumah sakit yang terletak di Kecamatan Batauga. Meskipun rumah sakit yang tersedia jumlahnya sedikit, namun pada tahun 2021 di Buton Selatan tersedia puskesmas sebanyak 9 puskesmas yang berada di setiap kecamatan. Selain itu, jumlah puskesmas pembantu ada sebanyak 17 puskesmas pembantu. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan. Beberapa puskesmas pembantu di Kecamatan Batauga, Siompu Barat, dan Siompu berhenti beroperasi. Harapannya, jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya mengingat jarak tempuh yang untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang lebih besar dan lebih lengkap.

Penambahan fasilitas kesehatan juga harus diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatannya. Dari tabel 3.2. dapat kita lihat bahwa tenaga kebidanan merupakan tenaga kesehatan yang jumlahnya

terbanyak di Kabupaten Buton Selatan dengan jumlah sebanyak 280 orang. Kemudian, tenaga keperawatan terdapat 254 orang, tenaga farmasi sebanyak 48 orang dan dokter sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3.2. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Batuatas	2	12	25	3	2
2	Lapandewa	1	22	15	4	5
3	Sampolawa	7	47	56	11	8
4	Batauga	18	109	101	14	7
5	Siompu Barat	1	5	23	4	2
6	Siompu	2	28	24	7	4
7	Kadatua	5	31	36	5	2
Buton Selatan		36	254	280	48	30

Sumber : Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

Penggunaan jaminan kesehatan oleh masyarakat dapat menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Selain itu, peningkatan jumlah pengguna jaminan kesehatan mencerminkan adanya pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Tahun 2021, persentase penduduk Buton Selatan yang menggunakan jaminan kesehatan sebesar 69,6 persen, dengan jaminan kesehatan yang digunakan adalah BPJS Kesehatan PBI. Sementara itu, sebanyak 30,4 persen penduduk tidak menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI. Sebanyak 7,92 persen menggunakan jaminan kesehatan dengan jenis BPJS Kesehatan Non PBI, pengguna Jamkesda sebanyak 3,48 persen, dan sisanya tidak menggunakan jaminan kesehatan.

BAB IV

PENDIDIKAN

7,54

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

13,24

Angka Harapan Lama Sekolah



99,29

Angka Partisipasi Sekolah
7-12 Tahun

96,18

Angka Partisipasi Sekolah
13-15 Tahun

49,44

Angka Partisipasi Sekolah
16-18 Tahun

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, dan ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rasio Murid Guru.

4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib

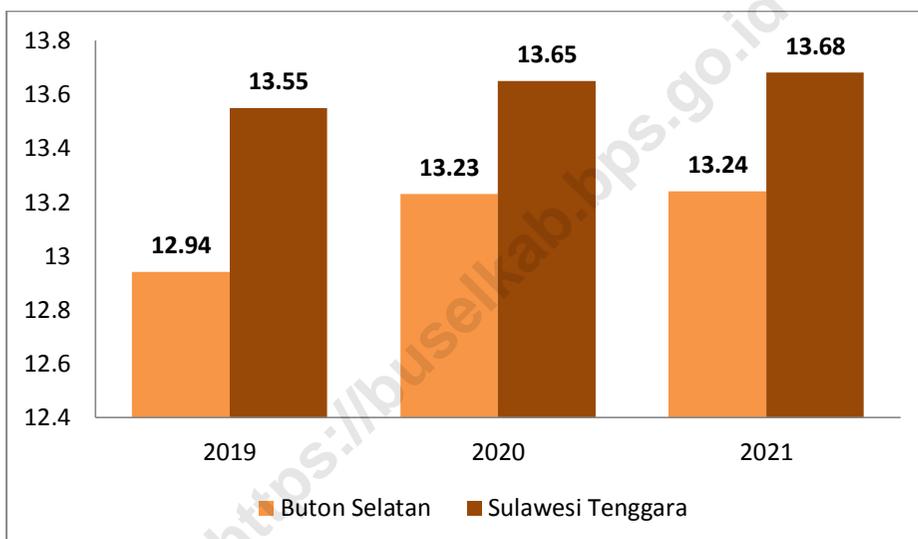
belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk usia tujuh tahun keatas. Secara tidak langsung, ada hubungan keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.

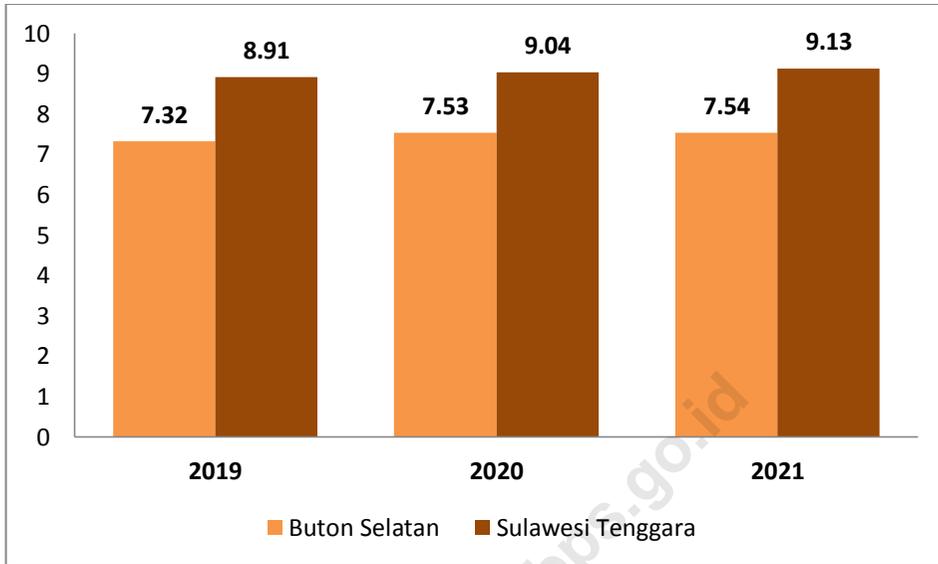
Pada tahun 2020, terjadi kenaikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buton Selatan bila dibandingkan dengan tahun 2019. HLS pada tahun 2019 sebesar 12,94 tahun dan naik menjadi 13,23 tahun di 2020.

Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 13.24 tahun. HLS sebesar 13,24 tahun menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D2 atau D3. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di wilayah ini. Namun meskipun mengalami peningkatan, HLS Kabupaten Buton Selatan masih berada di bawah rata-rata HLS di Sulawesi Tenggara yang menunjukkan angka sebesar 13,68 tahun pada tahun 2021.



Gambar 4.1. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti *standard* internasional yang digunakan oleh UNDP.



Gambar 4.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021

RLS di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2021 tercatat 7,54 tahun, angka ini terus meningkat selama tiga tahun terakhir. RLS sebesar 7,54 tahun menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, secara rata-rata penduduk Kabupaten Buton Selatan usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas 1) atau kelas VIII (SMP kelas 2). Dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Buton Selatan yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah ketika menginjak bangku SMP kelas 2. Meski RLS selalu meningkat dalam kurun waktu 2019-2021, RLS Kabupaten Buton Selatan masih berada di bawah RLS Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Hal ini berarti kondisi pendidikan di Kabupaten Buton Selatan masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk kondisi sekarang diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada

angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

4.2. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021

Ijazah/ STTB yang Dimiliki	Laki-laki	Perempuan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Tidak punya ijazah SD	16,50	22,22	19,51
SD/ sederajat	28,44	26,51	27,42
SMP/ sederajat	25,50	25,50	25,37
SMA/ ke atas	29,57	26,02	27,70

Sumber : Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Selatan 2021

Berdasarkan Tabel 4.1, apabila dilihat secara sekilas, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki yang memiliki ijazah pendidikan lebih tinggi daripada penduduk berjenis kelamin perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD/ sederajat sebesar 28,44

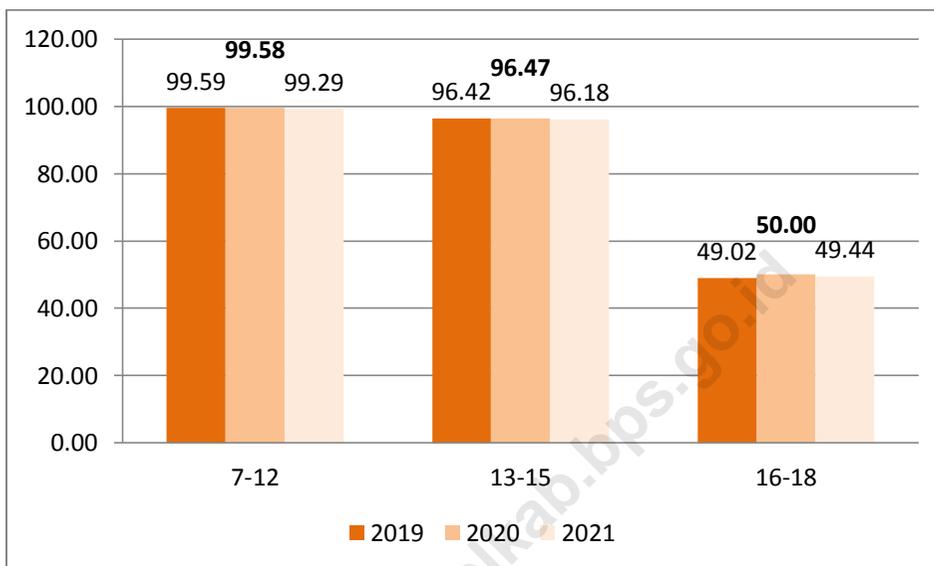
persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 26,51 persen. Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMA/ ke atas. Persentase penduduk laki-laki sebesar 29,57 persen sedangkan perempuan sebesar 26,02 persen. Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah SD lebih besar, yaitu sebesar 22,22 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 16,50 persen.

Secara keseluruhan, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah di Kabupaten Buton Selatan cukup tinggi, yaitu sebesar 80,49 persen. Persentase penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat sebesar 27,42 persen, ijazah SMP/ sederajat sebesar 25,37 persen, dan ijazah SMA/ ke atas sebesar 27,70 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 19,51 persen. Angka tersebut masih cukup besar, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kabupaten Buton Selatan dan dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan.

4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak

sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.



Gambar 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buton Selatan, 2019-2021

Pada tahun 2021 hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Buton Selatan sudah mengenyam pendidikan. Pada kelompok usia 13-15 tahun masih ada 3,82 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun penduduk yang belum bersekolah masih cukup besar yaitu sebesar 50,56 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penduduk yang mengenyam pendidikan pada tahun 2021 lebih rendah untuk setiap kelompok umur.

Bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di tahun 2021, APS penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan hampir di setiap kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 16-18 tahun untuk penduduk laki-laki mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi pada kelompok umur ini sebesar 8,71 persen. Di sisi lain, pada kelompok umur yang sama, angka partisipasi

sekolah untuk penduduk perempuan mengalami penurunan sebesar 11,37 persen.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Formal menurut Jenis Kelamin, 2020-2021

Karakteristik	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
APS						
7-12 tahun	99.19	99.10	100.00	99.46	99.58	99.29
13-15 tahun	94.01	93.63	100.00	99.52	96.47	96.18
16-18 tahun	40.32	49.03	61.29	49.92	50.00	49.44
APM						
SD/MI	97.61	99.10	98.38	96.97	97.98	97.96
SMP/MTs	89.81	89.98	84.30	85.27	87.54	87.94
SMA/SMK/MA	38.35	43.58	54.27	47.72	45.70	45.52

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Pada tahun 2021, rata-rata APM mengalami kenaikan, kecuali APM penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA yang mengalami penurunan. Pada jenjang SD/MI, APM mengalami penurunan sebesar 1,41 persen sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami penurunan sebesar 6,55 persen. Adanya penurunan ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu belum baik, khususnya untuk penduduk perempuan.

Apabila dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2021 untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, meskipun angkanya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan lainnya, APM penduduk laki-laki lebih tinggi.

4.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru.

Tabel 4.3. Jumlah Fasilitas Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan	SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat	
	Rasio	Jumlah Fasilitas	Rasio	Jumlah Fasilitas	Rasio	Jumlah Fasilitas
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Batu Atas	14	9	8	4	13	1
Lapandewa	14	9	7	6	12	4
Sampolawa	13	18	7	9	10	6
Batauga	10	14	4	9	7	6
Siompu Barat	16	8	7	4	12	2
Siompu	11	11	6	6	7	3
Kadatua	13	9	8	5	11	3

Sumber : Buton Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan

setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan kualifikasi guru, pelatihan, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Pada tahun 2021, rasio murid-guru yang tertinggi untuk jenjang pendidikan SD yakni sebesar 16 murid untuk satu orang guru, diikuti pada jenjang SMP perbandingannya 8 murid untuk satu orang guru, kemudian pada jenjang SMA dengan rasio 13 murid untuk satu orang guru. Nilai rasio guru-murid yang semakin rendah menunjukkan bahwa semakin efektif aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Buton Selatan.

Tidak hanya rasio murid-guru, untuk mengetahui kualitas pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas sekolah. Kecamatan di Buton Selatan yang memiliki fasilitas sekolah jenjang SD sederajat paling banyak adalah Kecamatan Sampolawa, yaitu sebanyak 18 sekolah. Jumlah fasilitas sekolah pada jenjang SMP sederajat paling banyak terdapat pada Kecamatan Sampolawa dan Batauga, yaitu sebanyak 9 sekolah. Sedangkan Kecamatan Batu Atas yang pada tahun sebelumnya hanya memiliki 3 sekolah, kini bertambah menjadi 4 sekolah. Sama seperti jenjang SMP sederajat, banyaknya fasilitas sekolah SMA sederajat di Kecamatan Sampolawa dan Batauga terbanyak diantara kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 6 sekolah. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kecamatan Batu Atas. Banyaknya fasilitas sekolah di setiap kecamatan sangat bergantung pada jumlah penduduk, khususnya penduduk usia sekolah. Rendahnya jumlah fasilitas sekolah di Kecamatan Batu Atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kecamatan tersebut lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

“Halaman Kosong”

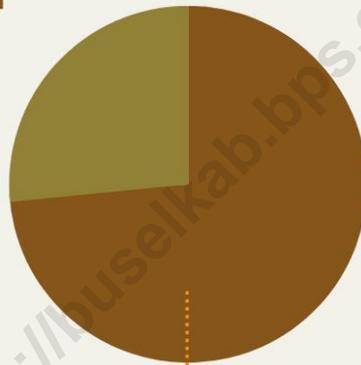
<https://busekab:pps.go.id>

BAB V

KETENAGAKERJAAN

PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN SEMINGGU YANG LALU

Bukan Angkatan Kerja
26.6%



Angkatan Kerja
73.4%

70,52%
Bekerja

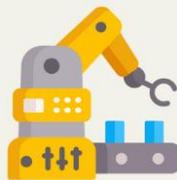
2,88%
Pengangguran

PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KEATAS MENURUT KELOMPOK LAPANGAN USAHA



Pertanian

53,44%



Manufaktur

12,94%



Jasa

33,62%

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas, dan kemampuan tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional, dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk 15 tahun keatas (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan), dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Buton Selatan diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*) dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kabupaten Buton Selatan yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi

ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut status pekerjaan.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Buton Selatan adalah 52.428 jiwa yang terdiri dari 38.484 angkatan kerja atau sekitar 73,40 persen dan sisanya sebanyak 13.944 jiwa bukan angkatan kerja atau sekitar 26,60 persen.

Tabel 5.1. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2021

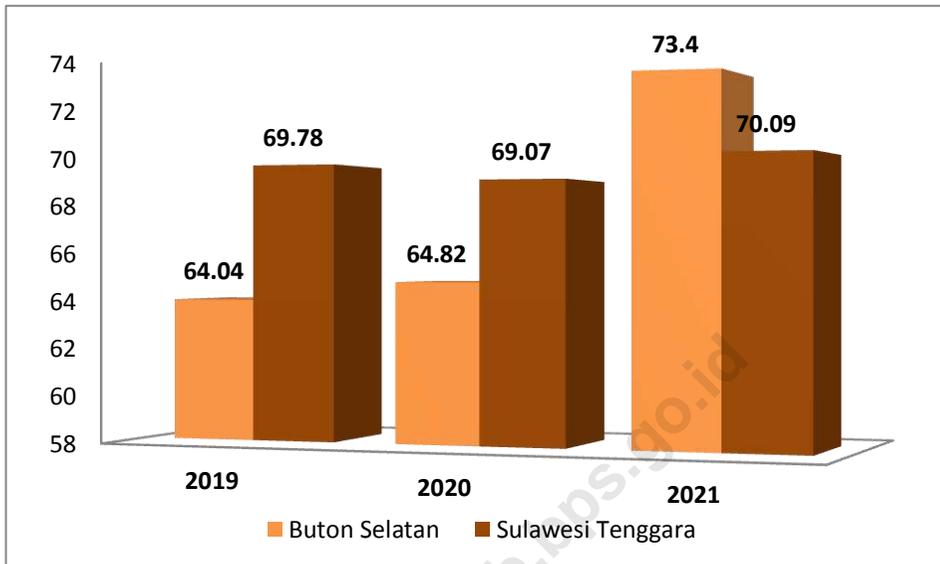
Kegiatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
Angkatan Kerja	21 941	16 543	38 484
- Bekerja	20 992	15 982	36 974
- Pengangguran	949	561	1 510
Bukan Angkatan Kerja	2 867	11 077	13 944
- Sekolah	1 574	2 801	4 375
- Mengurus Rumah Tangga	182	7 236	7 418
- Lainnya	1 111	1 040	2 151
Jumlah	24 808	27 620	52 428

Sumber : Publikasi Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

Ditinjau dari jenis kelamin, dari 52.428 penduduk usia 15 tahun ke atas, 24.808 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 27.620 penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 21.941 jiwa, jumlah ini lebih besar daripada jumlah angkatan kerja perempuan 16.543 jiwa. Namun persentase penduduk yang bekerja lebih besar penduduk perempuan yaitu sebesar 96,61 persen, sedangkan persentase penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 95,67 persen. Sementara itu, 1.510 penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan pengangguran (sementara belum bekerja / tidak bekerja). Penduduk usia kerja laki-laki yang menganggur sebanyak 949 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 561 jiwa.

Di sisi lain, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Buton Selatan didominasi oleh penduduk perempuan sebanyak 11.077 jiwa. Sebanyak 65,32 persen penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja mengurus rumah tangga; 25,29 persen bersekolah; dan 9,39 persen sisanya melakukan kegiatan selain yang telah disebutkan. Di kalangan masyarakat tradisional, kebanyakan perempuan sibuk melakukan urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah. Hal tersebut tercermin melalui keadaan angkatan kerja di Kabupaten Buton Selatan. Di sisi lain, kegiatan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja didominasi oleh bersekolah sebesar 54,90 persen.

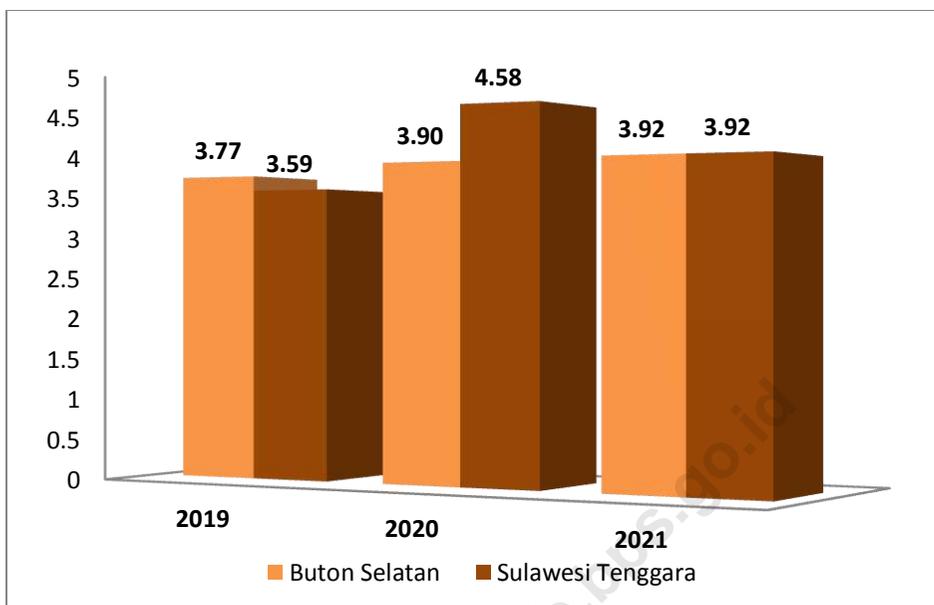
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja. Angka TPAK Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu 2019-2021 dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1. Perkembangan TPAK Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021

TPAK Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 sebesar 64,04 dan mengalami kenaikan 1,22 persen di tahun 2020 menjadi 64,82 persen. Lalu pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 73,40. Artinya, terdapat 73,40 persen penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan rata-rata TPAK di Sulawesi Tenggara, TPAK Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 dan 2020 lebih rendah daripada TPAK Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, TPAK Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 lebih tinggi dari TPAK provinsi.

Disamping angkatan kerja, masalah ketenagakerjaan tidak bisa dipisahkan dari pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) atau karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Gambar 5.2. Perkembangan TPT Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Gambar 5.2 menunjukkan perkembangan TPT Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2019-2021. TPT Kabupaten Buton Selatan pada Agustus 2019 sebesar 3,77 persen. Artinya, penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3,77 persen adalah pengangguran. Dua tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, TPT mengalami peningkatan menjadi 3,90 persen dan 3,92 persen. Apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Tenggara, TPT Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 lebih tinggi daripada TPT provinsi. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, TPT Kabupaten Buton Selatan lebih rendah dari TPT provinsi. TPT Kabupaten Buton Selatan sebesar 3,90 persen sedangkan TPT provinsi sebesar 4,58 persen. Sementara itu, pada tahun 2021, TPT di Kabupaten Buton Selatan dengan TPT provinsi berada pada angka yang sama yaitu 3,92 persen. Angka TPT ini harus menjadi perhatian karena TPT Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut.

5.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Bekerja

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Selain itu semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula kemampuan dan kualitas yang dimiliki seorang tenaga kerja. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
SD ke bawah	17 746	557	18 303	6 765
SMP	5 415	281	5 696	3 700
SMA	9 965	428	10 393	3 405
Perguruan Tinggi	3 848	244	4 092	74
Total	36 974	1 510	38 484	13 944

Sumber : Publikasi Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

Dapat dilihat dari tabel 5.2 bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja didominasi oleh lulusan SD ke bawah dengan jumlah 17.746 jiwa, di mana 96,96 persen bekerja dan 3,04 persen sisanya pengangguran. Jumlah terbesar selanjutnya adalah lulusan SMA sebanyak

10.390 jiwa, di mana 95,88 persen bekerja dan 4,12 persen sisanya pengangguran. Lulusan SMP yang termasuk angkatan kerja berjumlah 5.696, persentase yang bekerja sebesar 95,07 persen, sedangkan 4,93 persen sisanya menganggur. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi yang termasuk angkatan kerja berjumlah 4.092 jiwa, di mana 94,04 persen bekerja dan 5,96 persen sisanya menganggur. Partisipasi lulusan perguruan tinggi tersebut cenderung rendah apabila dibandingkan dengan lulusan lainnya. Secara keseluruhan, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Buton Selatan yang termasuk angkatan kerja didominasi oleh lulusan SD ke bawah.

Sama seperti angkatan kerja, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja didominasi oleh lulusan SD ke bawah sejumlah 6.765 jiwa. Selanjutnya didominasi oleh lulusan SMP sejumlah 3.700 jiwa dan lulusan SMA sejumlah 3.405 jiwa. Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Buton Selatan didominasi oleh lulusan SD ke bawah.

5.3. Lapangan Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.3. Pada Agustus 2021, secara umum persentase penduduk yang bekerja didominasi kategori Pertanian yakni sebesar 53,44 persen diikuti Jasa sebesar 33,62 persen. Sementara itu, kategori lapangan usaha yang terkecil adalah Industri Pengolahan sebesar 12,94 persen dari total penduduk yang bekerja atau sebanyak 4.785 jiwa.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang bekerja terkonsentrasi pada kategori Pertanian yakni sebesar 58,16 persen atau sebanyak 12.209 jiwa, diikuti kategori Jasa sebesar 25,82 persen atau

5.421 jiwa. Sementara itu, untuk penduduk perempuan, sebanyak 47,23 persen penduduk atau 7.549 jiwa bekerja di kelompok lapangan usaha Pertanian. Sedangkan di lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 8,90 persen atau 1.432 jiwa. Pada kelompok lapangan usaha jasa, jumlah penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 43,86 persen atau 7.010 jiwa.

Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2021

Kelompok Lapangan Usaha	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pertanian	12 209	58,16	7 549	47,23	19 758	53,44
Industri Pengolahan	3 362	16,02	1 423	8,90	4 785	12,94
Jasa	5 421	25,82	7 010	43,86	12 431	33,62
Total	20 992	100,00	15 982	100,00	36 974	100,00

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas Agustus 2021

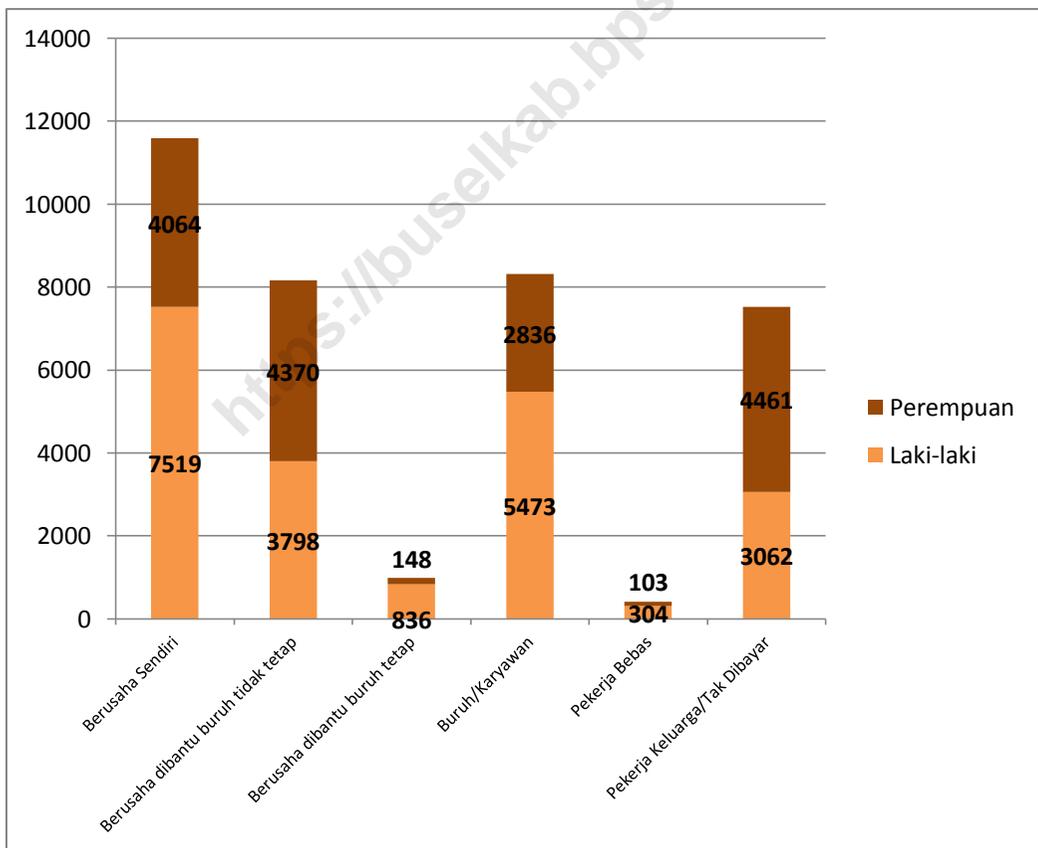
5.4. Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan dibedakan menjadi enam macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas, serta pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif 'tradisional', sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern terdapat lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha yang dengan buruh tetap.

Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama dikalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Penduduk Kabupaten Buton Selatan yang bekerja didominasi oleh pekerja berstatus berusaha sendiri. Pada tahun 2021 sebanyak 11.583 penduduk yang bekerja atau 31,33 persen pekerja di Kabupaten Buton Selatan berstatus berusaha sendiri. Kemudian status pekerjaan lainnya yang cukup dominan adalah buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu 8.309 penduduk bekerja atau 22,47 persen dan 8.168 penduduk bekerja atau 22,09 persen.



Gambar 5.3. Persentase Penduduk Kabupaten Buton Selatan Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021

Berdasarkan jenis kelamin, hampir seluruh status pekerjaan didominasi oleh penduduk laki-laki kecuali pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Dari 7.523 pekerja keluarga/tidak dibayar, terdapat 59,30 persen pekerja berjenis kelamin perempuan, sedangkan 40,70 persen sisanya laki-laki. Status pekerjaan utama terbesar yang dimiliki penduduk laki-laki adalah berusaha sendiri dengan jumlah 7.519 jiwa, sedangkan pada perempuan paling banyak berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar dengan jumlah 4.461 jiwa.

<https://busekab.bps.go.id>

“Halaman Kosong”

<https://use1kab.bps.go.id>

BAB VI

TARAF DAN POLA KONSUMSI

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN KELOMPOK PENGELUARAN MAKANAN (RUPIAH)

Makanan



Non Makanan



BAB VI

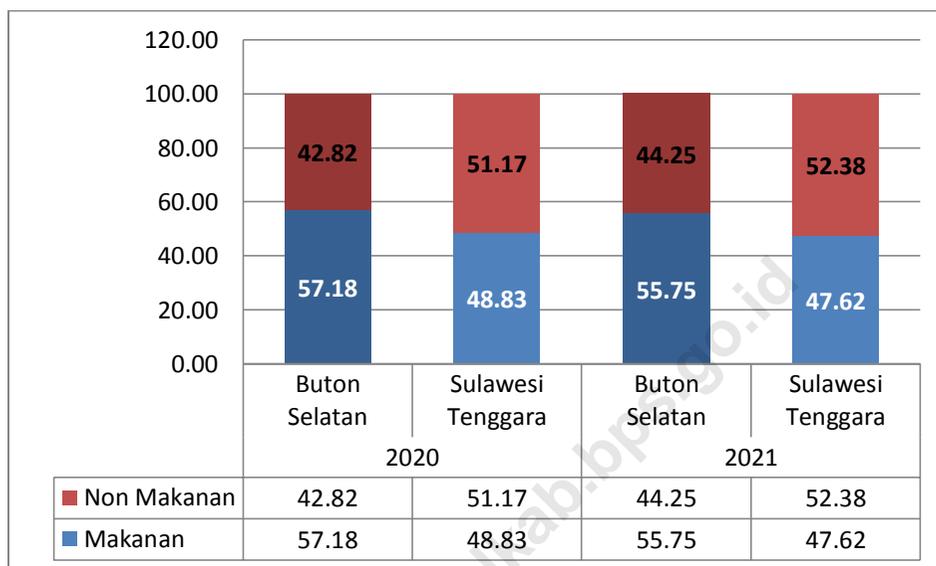
TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan

penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Gambar 6.1. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Buton Selatan dan Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Pengeluaran, 2020-2021

Pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp 637.771,-. Bila dilihat secara persentase, pengeluaran makanan dan bukan makanan mengalami perubahan namun tidak terlalu signifikan. Persentase pengeluaran makanan masih lebih besar daripada persentase pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 57,18 persen pada tahun 2020 menjadi 55,75 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan mengalami peningkatan dari 42,82 persen menjadi 44,25 persen. Besarnya persentase pengeluaran untuk makanan di Buton Selatan mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan karena sebagian besar pengeluaran masih diperuntukkan untuk kebutuhan makanan.

Sementara itu, persentase pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih besar untuk pengeluaran bukan makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021

sebesar Rp 1.070.493,- di mana Rp 509.723,- untuk makanan dan Rp 560.770,- untuk pengeluaran bukan makanan. Persentase pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 48,83 persen pada tahun 2020 menjadi 47,62 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan dari 51,17 persen pada tahun 2020 menjadi 52,38 persen pada tahun 2021.

Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Makanan Sebulan Menurut Kelompok Komoditi, 2020-2021

Kelompok Komoditi	Nominal (Rp)		Persentase	
	2020	2021	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Padi-padian	77 607	85 673	20,25	24,10
Umbi-umbian	7 450	6 787	1,94	1,91
Ikan	52 244	51 116	13,63	14,38
Daging	3 903	3 914	1,02	1,10
Telur dan Susu	16 930	21 305	4,42	5,99
Sayur-sayuran	27 191	28 540	7,09	8,03
Kacang-kacangan	3 140	3 455	0,82	0,97
Buah-buahan	23 338	8 949	6,09	2,52
Minyak dan Lemak	9 164	8 589	2,39	2,42
Bahan Minuman	13 554	12 982	3,54	3,65
Bumbu-bumbuan	7 947	7 813	2,07	2,20
Konsumsi Lainnya	5 197	5 147	1,36	1,45
Makanan dan Minuman	94 319	80 425	24,61	22,62
Rokok dan Tembakau	41 301	30 844	10,78	8,68
Total Makanan	383 286	355 539	100,00	100,00

Sumber : Publikasi Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

Tahun 2021, rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan mengalami penurunan dari Rp 383.286,- pada tahun 2020 menjadi Rp 355.539,- pada tahun 2021. Pengeluaran terbesar di Kabupaten Buton Selatan ada pada kelompok barang padi-padian, yaitu sebesar Rp 85.673,- pada tahun

2021, mengalami peningkatan sebesar Rp. 27.747,- dari tahun 2020. Selanjutnya, rata-rata pengeluaran terbesar kedua sebesar Rp 80.425,- pada kelompok barang makanan dan minuman jadi. Di sisi lain, pengeluaran terkecil di Buton Selatan ada pada kelompok barang kacang-kacangan, yaitu sebesar Rp 3.455,- pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebulan secara keseluruhan dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami penurunan. Tahun 2021, rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebulan sebesar Rp 282.230,-, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4.803,- dari tahun 2020. Kelompok barang yang mengalami penurunan adalah aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang yang tahan lama, serta keperluan pesta dan upacara. Penurunan paling signifikan terjadi pada kelompok barang yang tahan lama, yaitu dari Rp 28.951,- pada tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar Rp 13.631,- pada tahun 2021.

Rata-rata pengeluaran perkapita bukan makanan sebulan di Buton Selatan didominasi oleh kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, dengan persentase 60,99 persen. Kelompok ini mengalami peningkatan pengeluaran dari Rp 165.921,- pada tahun 2020 menjadi Rp 172.129,- pada tahun 2021. Kelompok lain yang mengalami kenaikan adalah kelompok pengeluaran untuk pajak pemakaian dan premi asuransi. Pengeluaran untuk komoditas tersebut pada tahun 2020 sebesar Rp 16.618,-. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 30,01 persen menjadi Rp 21.604,-. Selain didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pada tahun ini pengeluaran bukan makanan juga didominasi oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa.

Tabel 6.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Bukan Makanan Sebulan Menurut Kelompok Komoditi, 2020-2021

Kelompok Komoditi	Nominal (Rp)		Persentase	
	2020	2021	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga	165 921	172 129	57,81	60,99
Aneka Barang Dan Jasa	55 348	55 277	19,28	19,59
Pakaian, Alas Kaki, Dan Tutup Kepala	14 706	12 829	5,12	4,55
Barang Tahan Lama	28 951	15 320	10,09	5,43
Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi	16 618	21 604	5,79	7,65
Keperluan Pesta Dan Upacara/Kenduri	5 491	5 071	1,91	1,80
Total Bukan Makanan	287 033	282 230	100.00	100.00

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Jika diperhatikan pengeluaran untuk makanan dan non makanan menurut kelompok pengeluaran per kapita, rata-rata pengeluaran makanan perkapita pada dua golongan pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk bukan makanan, yaitu kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen tengah. Untuk kelompok 20 persen teratas, pengeluaran bukan makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi yaitu golongan 20 persen teratas sebesar Rp 1.321.618 perbulan.

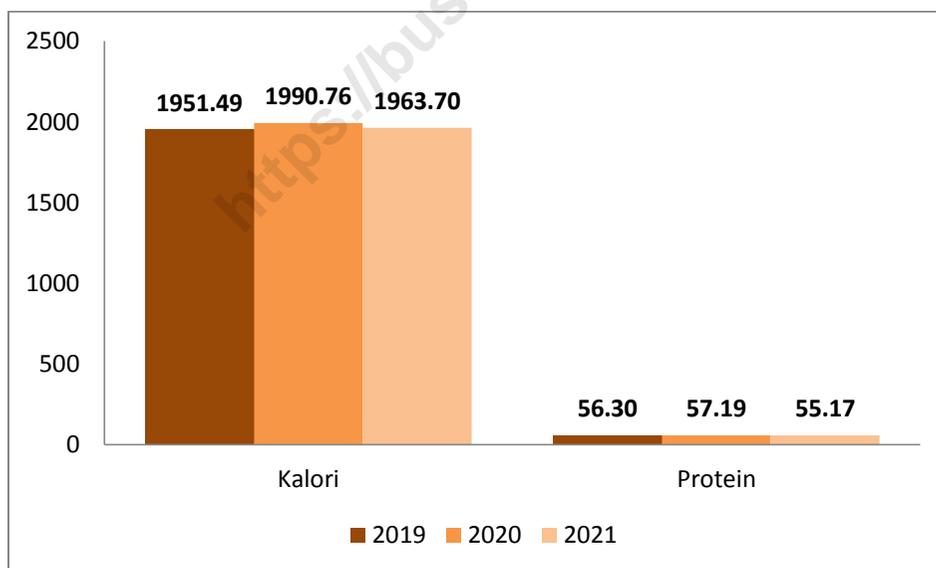
Tabel 6.3. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2021

Kelompok Pengeluaran	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
[1]	[2]	[3]	[4]
Makanan	232 105	349 419	615 776
Non Makanan	93 641	259 961	705 842
Total	325 746	609 380	1 321 618

Sumber : Publikasi Statistik kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Selatan 2021

6.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2,150 kkal dan 57 gram protein.



Gambar 6.2 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari, 2019-2021

Rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2021 sebanyak 1963,70 kkal. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya

Karya Pangan dan Gizi. Untuk memenuhinya masih diperlukan penambahan sedikit lagi saja yakni sebanyak 186,3 kkal. Sedangkan untuk konsumsi protein rata-rata konsumsi protein perkapita sehari adalah 55,17 gram. Jumlah ini, telah memenuhi ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Hal ini diharapkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya kecukupan gizi, terutama bagi penduduk usia anak-anak dan lansia.

<https://busekab.bps.go.id>

“Halaman Kosong”

<https://buselkab.bps.go.id>

BAB VII

PERUMAHAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA FASILITAS PERUMAHAN

96,12%

Ruta telah mengakses air minum layak



87,22%

Tempat Pembuangan Akhir Tinja Adalah Tangki Septik/SPAL

83,52%

Memiliki Fasilitas BAB yang Digunakan ART Sendiri

BAB VII

PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Selain itu, kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, termasuk juga fasilitas penunjang lain

yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Seluruh data perumahan pada publikasi ini dihasilkan dari hasil Susenas 2018, 2019, dan 2020.

7.1. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Menjadikan listrik sebagai sumber penerangan utama hingga ke pelosok negeri juga masih terus menjadi program utama yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2021, rumah tangga di Kabupaten Buton Selatan yang telah mengakses air minum layak mencapai 96,12 persen. Air minum layak yaitu air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng (keran), keran umum. Hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Angka 96,12 persen menunjukkan arti bahwa masih ada sebesar 3,88 persen rumah tangga yang belum dapat menikmati air minum yang layak. Persentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus

dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban yang digunakan untuk anggota rumah tangga sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2021, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri sebesar 83,52 persen, sisanya masih menggunakan jamban bersama-sama dengan rumah tangga lain dan jamban umum. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan satu tahun yang lalu. Peningkatan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki layanan sanitasi yang layak, tahun ini persentasenya sebesar 87,22 persen.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2019-2021

Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]
Air minum layak	74,45	98,58	96,12
Jamban sendiri	77,59	76,02	83,52
Layanan sanitasi layak	84,53	81,46	87,22
Sumber penerangan listrik	95,43	98,50	98,61

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, rumah tangga di Kabupaten Buton Selatan yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik sebanyak 98,61 persen, di mana 92,07 persen listrik PLN dan 6,54 persen listrik non PLN. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 98,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah terkait penyediaan penerangan listrik bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa mulai terlihat hasilnya.

7.2. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2019-2021

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]
Milik Sendiri	94,65	92,35	93,81
Bukan Milik Sendiri	5,35	7,65	6,19

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2021, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 93,81 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri sebesar 6,19 persen, di mana 5,61 persen menempati rumah bebas sewa dan 0,58 persen menempati rumah dinas. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, kepemilikan rumah tinggal milik sendiri mengalami peningkatan sebesar 1,46 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB VIII

KEMISKINAN

Penduduk Miskin di Buton Selatan

Jumlah
11.710 jiwa

Persentase
14,62%



Garis Kemiskinan

Rp 253.877

BAB VIII

KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Selanjutnya standar kehidupan ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi, dan distribusi serta letak geografisnya.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan

menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

8.1. Perkembangan Penduduk Miskin

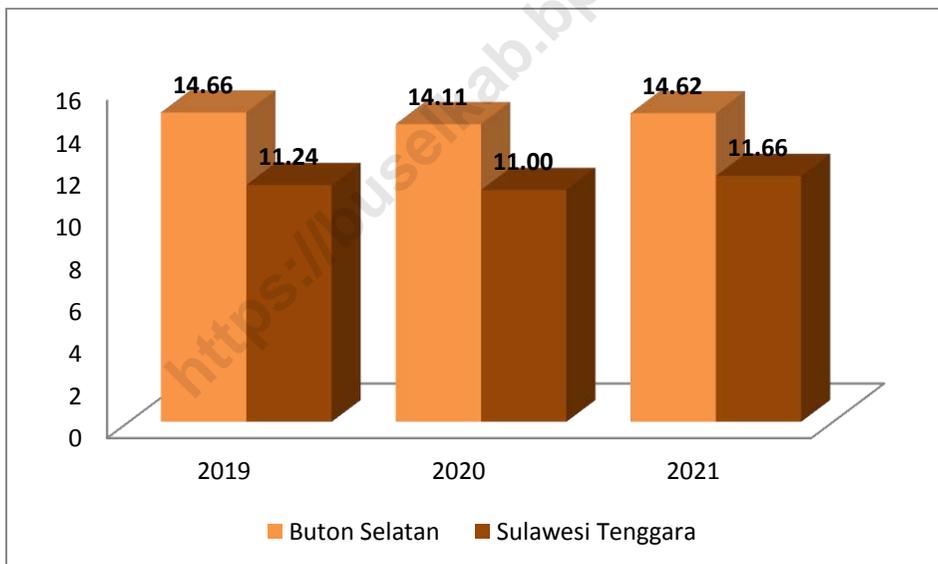
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat angka kemiskinan penduduk Kabupaten Buton Selatan sebesar 14,62 persen atau masih terdapat sebesar 11.710 penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan. Tren menurun untuk kemiskinan penduduk tidak dapat dipertahankan pada tahun 2021. Padahal, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan lebih rendah dari tahun 2019. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, diharapkan pemerintah terus meningkatkan program-program yang dapat menahan laju peningkatan angka kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya.

Tabel 8.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Buton Selatan, 2019-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
[1]	[2]	[3]
2019	11,81	14,66
2020	11,50	14,11
2021	11,71	14,62

Sumber: website BPS Sulawesi Tenggara (sultra.bps.go.id)

Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan, Kabupaten Buton Selatan masih menjadi penyumbang angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan Kabupaten Buton Selatan yang lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara di ketiga tahun tersebut. Angka kemiskinan Sulawesi Tenggara sedikit menurun dari 11,24 persen di tahun 2019 menjadi 11 persen di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 11,66 persen. Begitu pula angka kemiskinan di Buton Selatan yang mengalami penurunan dari 14,66 persen di tahun 2019 menjadi 14,11 persen di tahun 2020, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 14,62 persen.



Gambar 8.1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019-2021

8.2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis

kemiskinan Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan selama periode Maret 2019 – Maret 2021. Pada Maret 2019, garis kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp 235.847,-. Kemudian meningkat pada Maret 2020 menjadi Rp 248.184,-, dan pada Maret 2021 menjadi Rp 253.877,-.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P_1 pada Maret 2021 adalah sebesar 1,87. Nilai ini mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Tingginya nilai P_1 menunjukkan sulitnya beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk menanggulangi dan membebaskan penduduk dari kondisi kemiskinan.

Tabel 8.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, Maret 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	235 847	248 184	253 877
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	2,38	1,82	1,87
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,61	0,42	0,38

Sumber : Publikasi Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022

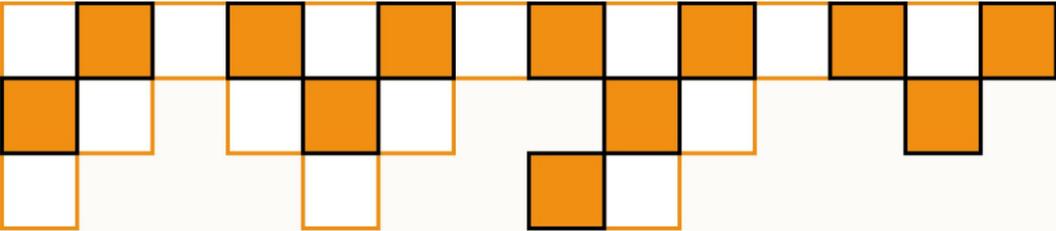
Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 mengalami penurunan di Maret 2021 (0,38) dibanding Maret 2020 (0,42). Penurunan angka indeks keparahan kemiskinan dari 2020 ke 2021 tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan penurunan pada tahun 2019 ke 2020. Angka indeks keparahan kemiskinan yang selalu mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir menyiratkan

bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Buton Selatan semakin kecil.

Kondisi rata-rata pengeluaran penduduk miskin memang cenderung makin mendekati garis kemiskinan, namun ketimpangan pengeluaran penduduk miskin masih terbilang besar jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara (0,56). Perbaikan ketimpangan pendapatan juga harus terus dilakukan karena masih ada kelompok penduduk miskin menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Disaat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami peningkatan.

“Halaman Kosong”

<https://busekab.bps.go.id>



BAB IX

SUMBER DATA

SENSUS PENDUDUK

SUSENAS

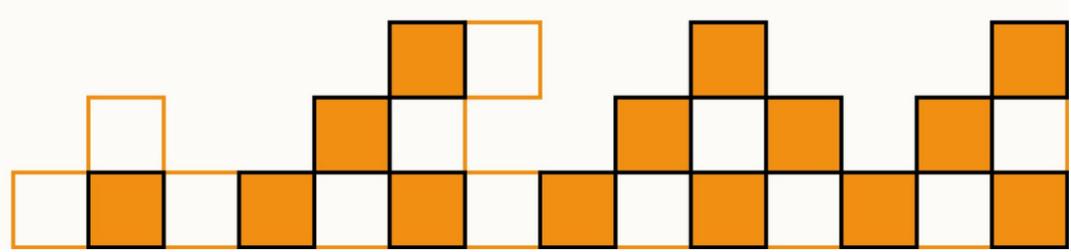
Survei Sosial Ekonomi Nasional

SAKERNAS

Survei Angkatan Kerja Nasional

SUMBER DATA LAINNYA

Catatan administrasi Kementerian/Instansi
Pemerintah di luar BPS



SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah modul Konsumsi/Pengeluaran, modul Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman dan modul Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

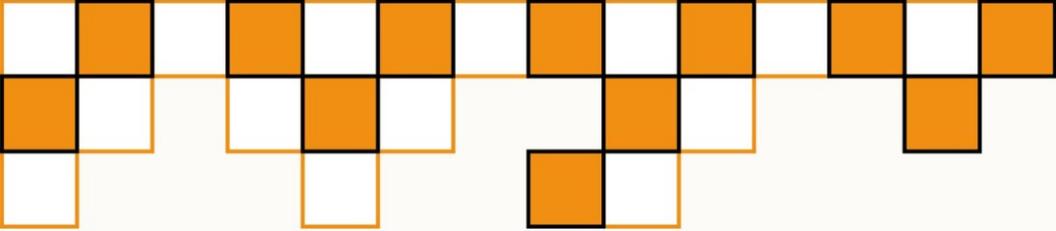
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 hingga 2014, Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Tahun 2015 hingga sekarang Susenas dilaksanakan semesteran yakni pada bulan Maret dan September setiap tahunnya. Pada bulan Maret untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota (300.000 rumah tangga sampel) sedangkan pada bulan September untuk estimasi sampai tingkat provinsi (75.000 rumah tangga sampel).

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2011 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2011 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Kementerian/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.



DATA

<http://buselkab.bps.go.id>

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON**

Jl. Protokol Kel. Saragi Kec. Pasarwajo

Kab. Buton

Email: bps7401@bps.go.id

Website: <http://buselkab.bps.go.id>

ISSN 0026-5543



9 770026 554023